

PERAN UNWOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN WANITA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2011-2018

Agnes Velha Yolanda Ardi¹
Nim. 1202045131

Abstract

This study aim to describe UN Women's (United Nation Women) Effort to Resolve Violence Against Women in Democratic Republic of Congo 2011-2018. The type of research is descriptive, tehnicque of data analyze is qualitative and use secondary data sourced from internet and library research. To explain UN Women's (United Nation Women) Effort to Resolve Violence Against Women in Democratic Republic of Congo 2011-2018, the author use international organization concept. The result shows that UN Women's efforts to end the violence against women in DRC (2011-2018) are women's economic empowerment and entrepreneurship, women's political and leadership, and supporting womens in peace and security.

Keywords: : *Violence Against Women, UN Women, Democratic Republic of Congo.*

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu ancaman yang mengerikan saat ini terutama bagi kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis dan seksual, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadinya (Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M Zen, "*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*" Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Dalam situasi konflik atau perang, bentuk kekerasan perempuan yang terjadi biasanya berupa penganiayaan, perbudakan seks, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Kaum perempuan dan anak-anak yang seharusnya dijaga dan diberi perlindungan, justru menjadi sasaran oleh pihak-pihak yang bertikai seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang dalam keadaan darurat seperti perang, sudah tidak berdaya untuk menegakkan hukumnya. (http://www.unicef.org/har09/files/HAR_Mid-year_Review_2009.pdf)

Munculnya fenomena kekerasan seksual di RDK merupakan salah satu dampak dari konflik Perang Kongo I pada tahun 1996 yang melibatkan milisi Hutu Rwanda melawan AFDL (*Alliance of Democratic Force for the Liberation*) dan Perang Kongo II antara Mai-Mai dan milisi pro Hutu melawan para milisi pro Tutsi yang berakhir

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: agnes.vella@yahoo.com

pada tahun 2003. Kekerasan terhadap wanita dilakukan sebagai aksi teror untuk melemahkan mental musuh dan meneror warga sipil. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar etnisitas dimana perempuan ditarget secara berturut-turut oleh kelompok bersenjata lain karena latar belakang etnis. Bahkan ada satu etnis dengan praktek ritualnya yang bertujuan untuk terhindar dari kesialan dan mendapatkan kekuatan magis dengan cara memperkosa wanita dari etnis musuh, membunuh kemudian memakan dagingnya.

(<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.html>)

Perkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan pelecehan secara verbal dan non verbal tetap menimpa kaum perempuan di RDK walaupun konflik sudah berakhir. Kekerasan terhadap kaum perempuan dilakukan oleh kelompok bersenjata, pasukan keamanan pemerintahan RDK, pekerja tambang di lokasi penambangan mineral dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Perempuan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman dalam aktivitas mereka. Anak-anak perempuan sebagian tidak dapat menempuh pendidikan yang baik.

(https://issuu.com/ipisresearch/docs/ituc_violence_rdc_eng_lr-1)

Pemerintah RDK tidak dapat berbuat banyak untuk menekan angka kekerasan seksual yang terjadi karena hal tersebut digambarkan sebagai sebuah hal yang biasa atau kuatnya budaya impunitas (kekebalan) sehingga didapati sistem peradilan tidak dapat berjalan dan kebanyakan pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat lolos begitu saja dari hukuman. Saat itu banyak sekali pejabat yang melindungi prajuritnya dari sistem peradilan dengan cara menggagalkan surat perintah penangkapan, campur tangan dalam penyelidikan dan persidangan, sampai membantu untuk lolos dari sel penjara.

(https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_violence_rdc_eng_lr.pdf.pdf)

Tingginya angka kekerasan terhadap wanita yang tidak dapat diatasi secara mandiri ini mengundang reaksi dari beberapa lembaga internasional salah satunya *United Nation Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women* (UN WOMEN). UN Women adalah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dioperasikan di RDK sejak 2011. Alasan penulis memilih UN Women karena UN Women mempunyai visi dan misi yang tepat untuk mengatasi masalah kekerasan berbasis gender yang terjadi dan menyadarkan pemerintah bersama dengan lembaga hukum untuk menghapuskan impunitas yang terjadi karena seharusnya lembaga hukum memiliki otoritas yang kuat untuk menindaklanjuti kasus ini tetapi pada kenyataannya budaya impunitas masih terlalu melekat dan cukup menjadi hambatan sehingga tidak menimbulkan suatu efek jera bagi para pelakunya.

Masih banyak terjadi kekerasan wanita di RDK walaupun sudah ada upaya dari pemerintah dalam negeri dan bantuan pihak luar seperti UN Women sebagai sebuah organisasi internasional. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul peran UN Women dalam mengurangi kekerasan wanita di RDK.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. (Teuku May Rudy, ” *Administrasi dan Organisasi Internasional*” (Bandung: Angkasa, 2009) hlm 3)

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Sejalan dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu: (Leroy Bennet. “*International Organization, Principle and Issue*”. Eaglewood, 1995, New Jersey: Prentice Hall Inc)

- 1) Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
- 2) Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peran organisasi internasional menurut Teuku May Rudy adalah sebagai berikut: (Teuku May Rudy, ” *Administrasi dan Organisasi Internasional*”, (Bandung: Angkasa, 2009) hlm 27)

- 1) Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
- 2) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, *peace keeping*, dan lain-lain.

Konsep Kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, dan kekerasan fisik. Kekerasan cenderung mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan agresi dan pelanggaran yang bentuknya bermacam-macam seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain yang berdampak secara fisik maupun psikologis. Johan Galtung membagi kekerasan dalam segitiga konflik sebagai berikut:

Gambar 1.3
Conflict Triangle Galtung



Dalam gambar segitiga konflik di atas, kekerasan dibagi menjadi kekerasan yang terlihat dan kekerasan yang tidak terlihat. Kekerasan yang tidak terlihat antara lain *cultural violence* yang bersumber dari sikap rasisme, kebencian hingga ketidakmampuan untuk bertoleransi. *Structural violence* muncul dari diskriminasi dan segala bentuk penyangkalan hak seseorang. Sedangkan kekerasan yang terlihat adalah *direct violence* berupa pemukulan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan lain-lain yang berhubungan dengan kekerasan fisik. (Johan Galtung. 2004. “*Violence, War and Their Impact : On Visible and Invisible Effects of Violence*”)

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk memaparkan dan menjelaskan secara sistematis bagaimana peran *United Nation Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women* (UN WOMEN) dalam mengatasi kekerasan wanita di Republik Demokratik Kongo tahun 2011-2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data teori dan konsep melalui buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan kemudian dengan menggunakan teori konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil Penelitian

Peran UN Women Mengatasi Kekerasan Wanita di RDK

Berdasarkan konsep Peran Organisasi Internasional yang digunakan penulis, UN Women berperan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk masalah dan persoalan yang dihadapi negara anggotanya. UN Women berperan penting untuk mendukung Kementerian Gender di RDK dengan upaya sebagai berikut:

1) Memberdayakan ekonomi dan kewirausahaan perempuan

Para kaum wanita sebagian besar bekerja di lokasi pertambangan dan bekerja melayani di bar-bar kecil tempat hiburan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat selayaknya kaum pria dan mendapat upah yang tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi. Wanita dipaksa oleh suami mereka bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga.

(<https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>)

52% dari populasi RDK adalah kaum wanita dan sebagian besar dari mereka terlibat dalam pertanian. Sebagai mayoritas petani dan pengusaha kecil di bidang pertanian, perempuan terkena dampak secara tidak proporsional. Mereka kehilangan produksi dan mata pencaharian padahal wanita memegang peran kunci dalam keluarga. Efek perubahan iklim ini menyebabkan kaum wanita mau tidak mau kembali melakukan pekerjaan dalam sektor pertambangan dan bekerja sebagai pelayan di tempat hiburan malam demi mencukupi kebutuhan mereka (<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/11/empowering-women-through-climate-smart-agriculture-in-the-drc>)

Melihat hal itu, UN Women dengan mitra pelaksanaanya *Ministry of Women Empowerment and the Family (MINPROFF)* dan *Ministry of Employment and Vocational Training (MINEFOP)* memfasilitasi dengan membuka pusat edukasi yang disebut *Second Chance Education Flagship (SCE)*. Dalam kegiatannya, SCE mengadakan pelatihan keterampilan dalam menjahit, pelatihan dalam sektor pertanian dan lokakarya. Kaum wanita didorong untuk berwirausaha menjual barang dan jasa yang layak. Melalui hal ini, wanita tidak harus bergantung kembali pada kegiatan penambangan yang beresiko besar mengalami tindakan kekerasan. Upaya ini juga bisa mengangkat kaum perempuan dari segi ekonomi dan mendapat mata pencaharian lain untuk kehidupan keluarga mereka. (https://www.ituccei.org/IMG/pdf/ituc_violence_rdc_eng_lr.pdf)

2) *Membuka peluang bagi wanita dalam bidang politik*

Partisipasi wanita dalam bidang politik di RDK tergolong lemah, baik itu sebagai pemilih ataupun sebagai calon anggota parlemen. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai tradisional budaya, kurangnya pendidikan dan kekuatan ekonomi, serta struktur kekuasaan yang didominasi oleh kaum pria. Pada tahun 2010, keterwakilan wanita dalam politik hanya mencapai 8,4% di tingkat nasional dan 4,6 di tingkat senat, jauh dari angka yang ditetapkan oleh undang-undang. (https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-att/drc_2017.pdf)

Melihat angka partisipasi wanita yang sangat rendah ini, kaum wanita difasilitasi UN Women dengan cara menyediakan pendidikan kewarganegaraan, kepemimpinan, dan politik. UN Women merekrut para kaum wanita untuk duduk di parlemen dan memastikan keterlibatan wanita sebanyak 30% dalam daftar partai politik. Angka 30% diterapkan secara global bagi negara yang ingin menerapkan demokrasi dengan baik dan ingin berkonsentrasi terhadap perbaikan kondisi wanita adalah suatu hal yang wajib.

UN Women membentuk *Dortie Officielle De La Dynamique National Des Femmes Candidates (DYNAFEC)* untuk mengumpulkan kandidat wanita untuk tujuan bersama yaitu partisipasi yang lebih besar dari wanita dalam politik dan di luar afiliasi geografis mereka atau partai politik mereka. DYNAFEC menyoroti keuntungan dari keterlibatan perempuan dalam politik, sebagai pemilih dan kandidat. Maksud dan tujuan lainnya untuk memanfaatkan pengalaman kepemimpinan perempuan Afrika, membangun jaringan pemimpin perempuan yang ada dan yang baru muncul, serta mengembangkan kemitraan baru untuk

memperkuat kapasitas perempuan. DYNAFEC memberikan pelatihan kepemimpinan, membimbing dan melatih para pemimpin wanita dalam politik. Selain itu DYNAFEC juga saran teknis dan dukungan untuk melayani calon pemimpin politik wanita. DYNAFEC melakukan sosialisasi tentang tata cara kampanye baik. Kegiatan memberikan pengetahuan tentang sikap dan strategi yang harus diadopsi selama periode pemilihan, pengetahuan tentang kerangka hukum pemilu, dan teknik berkomunikasi selama periode pemilihan.

(<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/05/unelected-women-candidates-gather-to-build-on-their-experiences>)

3) *Wanita dalam sistem keamanan dan perdamaian*

Keterlibatan wanita dalam pembicaraan mengenai sistem keamanan dan perdamaian sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh pembentukan *The Peace, Security and Cooperation Framework* (PSCF) oleh World Bank pada tahun 2013 mengangkat topik kekerasan seksual. Namun tingkat partisipasi wanita dalam acara ini tergolong rendah. Tidak ada perwakilan perempuan dalam proses PSCF dan 11 penandatanganan hanya dilakukan oleh laki-laki. Hanya ada seorang wanita dari 4 saksi namun hanya menjadi pengamat tanpa kekuatan untuk menyuarakan pendapat. Negosiasi perdamaian didominasi elit-elit yang hanya membahas kekuasaan dan sumber daya tetapi tidak membahas struktur sosial dan ketidakadilan sosial. Isu-isu tersebut selalu diprioritaskan dibanding dengan masalah kekerasan berbasis gender.

(https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anj6-att/drc_2017.pdf)

UN Women mendukung kementerian gender untuk mengimplementasikan peran wanita dalam keamanan dan kedamaian yaitu dengan mendukung keberadaan wanita untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, proses penyelesaian konflik, dan proses kemanusiaan pasca konflik serta mendorong lembaga hukum untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan. UN Women menyelenggarakan sebuah forum *Second Women Leaders Forum for Africa's Transformation* bekerjasama dengan pemerintah dan Uni Afrika. Forum ini adalah bagian dari *African Women Leaders Network* (AWLN). AWLN berupaya untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan Afrika dalam membawa perubahan transformatif yang berfokus pada perdamaian, keamanan dan pembangunan, kemudian untuk memanfaatkan kekayaan pengalaman kepemimpinan perempuan Afrika, membangun jaringan pemimpin perempuan yang ada dan yang baru muncul, serta mengembangkan kemitraan baru untuk memperkuat kapasitas perempuan.

AWLN memobilisasi lebih dari 120 pemimpin perempuan dari berbagai sektor di Afrika, diikuti 6 perwakilan wanita dari RDK yang terdiri dari para pemimpin tradisional dan agama, wanita dan pemuda serta otoritas lokal. Para peserta dilatih tentang konsep-konsep gender dan hak asasi manusia, kepemimpinan, perdamaian dan keamanan manusia, peringatan dini mengenai pentingnya menempatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan, serta tentang manajemen perbatasan.

(<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/04/africa-women-leaders-network-convening>)

Perwakilan dari RDK yang berpartisipasi dalam AWLN, mengadakan sebuah diskusi terbuka dan pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari 25 September 2018 yang difasilitasi oleh Kementerian Gender. Mereka dilatih untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dengan meningkatkan harga diri, bertahan terhadap pelecehan seksual dan esensi menjadi panutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang membatasi partisipasi wanita dalam membangun perdamaian, dan melatih mereka tentang cara menengahi atau menyelesaikan konflik dalam komunitas mereka. Diskusi yang dilakukan juga dibahas tentang elemen-elemen yang mendukung perempuan dalam menopang mereka dalam posisi kepemimpinan dan proses perdamaian yang setidaknya bisa dimulai dari komunitas kecil di kehidupan mereka masing-masing.

Hambatan UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Wanita di RDK

Dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya, sebuah organisasi tentu memiliki kendala dan hambatan dalam menjalankan misinya. Yang pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dan target dari sebuah organisasi internasional tersebut menjadi terhambat dan tidak tercapai misinya. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut:

- 1) *Keberlanjutan konflik bersenjata dan perang sipil di Republik Demokratik Kongo*
Perang sipil dan konflik bersenjata yang belum berakhir di RDK menjadi salah satu hambatan bagi UN Women untuk menuntaskan kekerasan terhadap wanita disana. Situasi konflik yang semakin mencekam membuat masyarakat RDK menjadi merasa terancam, baik itu ancaman langsung ataupun tidak langsung. UN Women beserta organisasi internasional lainnya telah menghimbau kelompok-kelompok bersenjata untuk segera menghentikan semua serangan secara langsung ataupun tidak langsung pada warga sipil. (*Peran UNICEF Atas Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo (2004-2008)*) Surabaya: Universitas Airlangga)

UN Women juga meminta untuk segera menghentikan perekrutan tentara anak dalam bentuk apapun dan segera memulai proses demobilisasi semua tentara anak. Mereka memastikan penghentian segera atas segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil terutama anak-anak dan kaum wanita. UN Women juga menjamin keamanan penduduk sipil serta mengizinkan aktor kemanusiaan untuk bekerja menjalankan misinya. Namun himbauan tersebut pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Ketidakamanan dan rasa khawatir juga dirasakan oleh pemerintah dan relawan-relawan UN Women ketika menjalankan proyek dan programnya di beberapa daerah.

- 2) *Budaya Impunitas di Republik Demokratik Kongo*
Kuatnya budaya impunitas menjadi hambatan tersendiri bagi UN Women untuk dapat mengatasi kekerasan wanita di RDK. Presiden RDK memang telah mengakui adanya aksi kekerasan seksual di dalam wilayah konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak dan kaum wanita sebagai korbannya namun tidak ada pernyataan resmi tentang adanya pelanggaran HAM. Selain itu juga tidak ada upaya untuk mencari kebenaran dan pembuktian serta pemulihan bagi korban-korbannya. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya suatu

impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM secara khusus pada kasus kekerasan terhadap wanita.

(https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_violence_rdc_eng_lr.pdf)

Impunitas adalah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Impunitas dapat juga berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum internasional didefinisikan sebagai “ketidakmungkinan (*de jure* atau *de facto*) untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan, sipil, administratif atau *displiner*, karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan.

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW) yang dijadikan acuan oleh UN Women pun tidak mampu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap wanita di RDK. UN Women seharusnya dapat membentuk sebuah penerapan metode praktis baru yang lebih dari konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) yang nantinya fungsinya dapat dijalankan dan terwujud dengan baik oleh UN Women. Penerapan metode praktis baru di wilayah konflik di RDK memang sangat diperlukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan budaya impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wanita di RDK yang kemudian dapat dijadikan alat untuk mengadili dan menyelidiki kasus-kasus kekerasan wanita di RDK.

3) *Keterbatasan Akses Operasional*

Dalam mewujudkan misinya, UN Women terkendala dengan akses operasionalnya. Yang pertama adalah keterbatasan akses infrastruktur yang menyebabkan ketidakamanan dan kesulitan yang besar bagi para relawan UN Women untuk menjalankan misinya. Akibatnya adalah UN Women hanya mengaplikasikan proyek kerjanya di beberapa wilayah saja. Beberapa wilayah terpencil cenderung tidak terjamah oleh UN Women.

(<https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo>)

Banyak akses-akses jalan yang rusak akibat konflik kecil. Seperti jembatan yang putus, struktur jalan yang rusak, tidak adanya penanda arah jalan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya bahan dan material serta curah hujan yang tinggi sehingga memperburuk keadaan jalan. Medan jalan yang buruk, membuat perjalanan tidak dapat ditempuh dengan kendaraan biasa karena akan merusak komponen kendaraan yang digunakan. Keterbatasan sarana transportasi ini juga membuat relawan UN Women tidak dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang juga mengalami kasus kekerasan wanita yang tinggi.

4) *Keterbatasan Air Bersih dan Fasilitas Kesehatan*

Keterbatasan air bersih dan fasilitas kesehatan menjadi hambatan bagi UN Women untuk menjalankan misinya. Akibatnya ialah banyak para korban yang menderita penyakit malaria, diare, pneumonia, kolera, ebola, dan gizi buruk. Penyebaran penyakit ini sudah dianggap darurat. Pada umumnya penyebaran penyakit itu terjadi di wilayah konflik di mana puluhan kelompok bersenjata beroperasi. Itulah sebabnya badan-badan bantuan terpaksa menanggukuhkan atau memperlambat upaya penyelamatan.

(<https://www.who.int/dg/speeches/detail/ihr-emergency-committee-on-evd-drc-north-kivu>)

Penyebaran penyakit menular dan mematikan ini merupakan dampak dari keterbatasan air bersih contohnya adalah penyakit kolera. Kolera paling sering ditularkan melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi bakteri. Faktor risiko untuk tertular kolera juga termasuk tinggal di daerah berisiko tinggi, seperti Republik Demokratik Kongo, tinggal di kamp-kamp pengungsi atau permukiman yang tidak memiliki sistem sanitasi yang memadai, dan minum air yang tidak direbus atau tidak diolah. Di wilayah perkotaan, akses air bersih sulit untuk didapatkan karena mengalami pertumbuhan populasi yang cukup cepat. Infrastruktur pasokan air belum mampu untuk mengimbangi pertumbuhan populasi, sehingga sepertiga dari pabrik pengolahan yang tersedia tidak beroperasi. Daerah pedesaan di RDK bahkan memiliki akses yang lebih buruk ke air bersih karena 60% sistem air di daerah pedesaan tidak berfungsi dan sebagian besar akses air tidak mendapatkan pemantauan dan pemeliharaan yang memadai.

Mewabahnya penyakit dan keterbatasan air bersih menjadi hambatan bagi relawan UN Women. Relawan sulit menuju lokasi-lokasi yang menjadi target mereka. Kondisi ini juga berdampak bagi wanita-wanita yang ada di RDK. Mereka tidak dapat mengikuti pelatihan khusus untuk menghindari ancaman kekerasan yang dilaksanakan UN Women karena khawatir dengan wabah penyakit dan mendapatkan kekerasan dari pasukan-pasukan militer.

(<https://www.who.int/countries/cod/en/>)

Kesimpulan

Republik Demokratik Kongo merupakan negara miskin berkembang yang sangat rentan untuk mengalami kekerasan terhadap wanita. Kasus kekerasan wanita di RDK dipicu oleh Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perang tersebut cenderung menggunakan wanita sebagai alat perang. Kaum wanita diperkosa dan dibunuh untuk menjatuhkan mental lawan mereka. Setelah perang berakhir, kekerasan terhadap wanita tidak berhenti. Hal itu disebabkan oleh konflik etnis yang masih terjadi dan masih menggunakan wanita sebagai alat perang mereka walaupun konflik ini bukan konflik berskala besar. Wanita masih saja menjadi sasaran untuk menjadi korban kekerasan.

Hal ini menjadi sorotan bagi beberapa organisasi salah satunya UN Women yang dioperasikan di RDK pada tahun 2011. UN Women membawa misi bagi RDK yang diharapkan bisa mengatasi kekerasan ini. Misi yang dijalankan adalah dengan cara melibatkan wanita dalam dunia politik, melibatkan wanita dalam sistem keamanan

dan kedamaian, kemudian memberdayakan ekonomi wanita dan membuka peluang wirausaha bagi wanita di RDK mengingat ketergantungan wanita RDK pada pekerjaan di pertambangan dan tempat hiburan malam yang beresiko terjadinya kekerasan wanita. Namun dalam menjalankan misinya itu UN Women mengalami hambatan yaitu tentang konflik skala kecil yang terjadi, mengakarnya budaya impunitas, keterbatasan air bersih dan layanan kesehatan serta tidak tersedianya akses yang memadai. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan wanita masih terjadi bahkan setelah bergabung di RDK.

Daftar Pustaka

Buku

Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Rudy, Teuku May, ” *Administrasi dan Organisasi Internasional*”, (Bandung: Angkasa, 2009) hlm 27.

Skripsi

Kusuma, Yeni. *Peran UNICEF Atas Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo (2004-2008)*”
Surabaya: Universitas Airlangga

Internet

Galtung, Johan. 2004. *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence. in Polylog: Forum for Intercultural Philosophy*
5, Diakses dari <http://them.polylog.org/5/fgj-en.html>

Global Security, “Congo Civil War” dikutip dari
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.html>

ITUC Violence, “Violence against women in Eastern Democratic Republic of Congo” diakses dari https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_violence_rdc_eng_lr.pdf

JICA, “ *Country Gender Profile Democratic Republic of the Congo Final Report*”
diakses dari
https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-att/drc_2017.pdf

Kishi, Roudabesh, “*Rape as a Weapon of Political Violence, Part 1: Trends Across Africa*” Dikutip dari http://www.crisis.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/02/Rape-A_Figure-3.png.

UNDP, “*Basic Fact About the United Nations*”, New York, 2011, dikutip dari
<http://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts#>

UNICEF. *Mid Year Review: Humantitarian Action DRC* dikutip dari
http://www.unicef.org/har09/files/HAR_Mid-year_Review_2009.pdf.